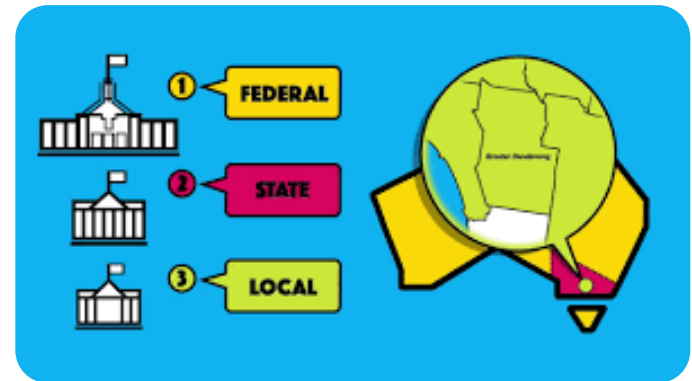


E-Government , E-Diplomacy dan Paradiplomacy



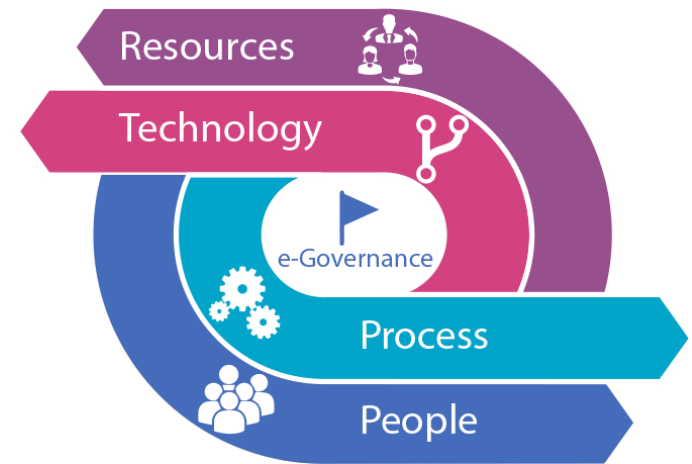
- Undang-Undang No.9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dengan semangat otonomi daerah, mendorong setiap daerah untuk berupaya meningkatkan citra, kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan tentunya kualitas pelayanan publiknya.
- Penerapan *E-Government* dalam penyelenggaraan pemerintah dinilai dapat meningkatkan performa kinerja Pemerintah Daerah



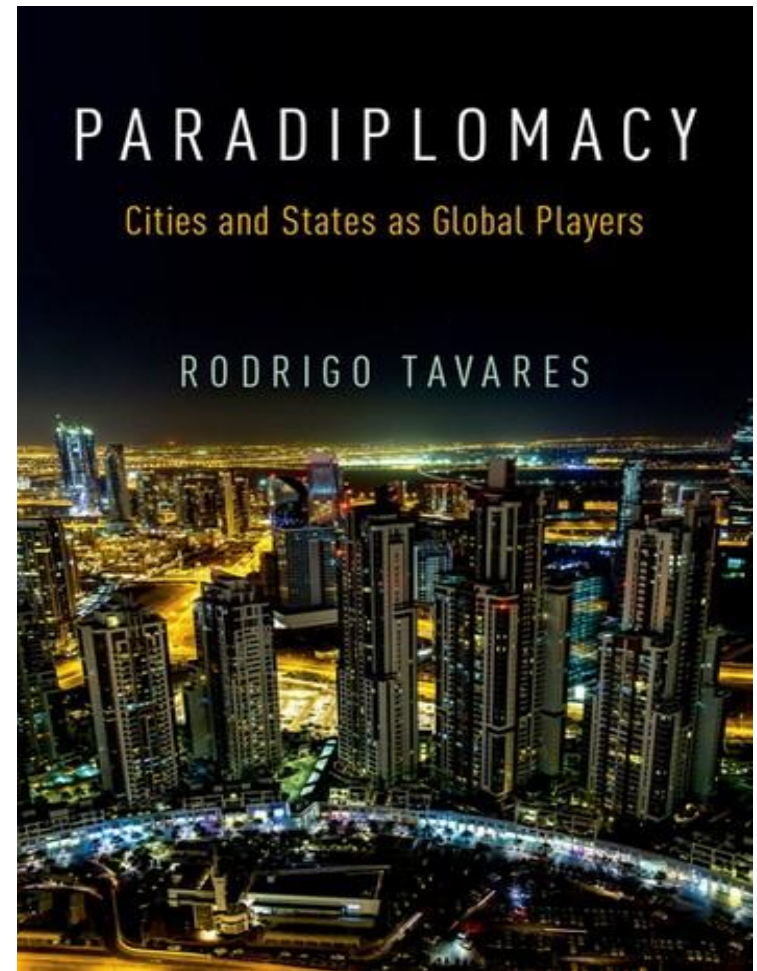
Model Hubungan E-Government

Jenis Hubungan	Deskripsi	Contoh Aplikasi
Government to Citizen	Memberikan pelayanan kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Perpanjangan SIM atau STNK Online• Imigrasi Online
Government to Business	Menerapkan pelayanan dengan menerapkan teknologi informasi untuk mempermudah interaksi antara badan usaha dan pemerintah	<ul style="list-style-type: none">• E-Procurement• E-Pajak, yang dapat meminimalisir waktu dan korupsi di bidang perpajakan
Government to Government	Kebutuhan untuk saling berkomunikasi dan berinteraksi antar negara-negara maupun antar badan pemerintah, tidak hanya berkaitan dengan diplomasi semata namun juga memperlancar kerjasama dalam hal administrasi perdagangan, mekanisme sosial budaya dan proses-proses politik	<ul style="list-style-type: none">• Website resmi pemerintah• Aplikasi yang menghubungkan kantor-kantor pemerintah dengan kedutaan besar dan kantor konsulat• Pengembangan sistem data inteligen yang mendeteksi boleh tidaknya seseorang masuk atau keluar dari suatu negara• Smart Embassy
Government to Employee	Untuk meningkatkan kinerja pegawai atau pekerja yang berkeja di institusi yang melayani masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Aplikasi terpadu seperti simpeg• Sistem asuransi kesehatan

- **E-diplomacy** sebagai salah satu cara berdiplomasi lewat internet ini setidaknya bisa dimanfaatkan secara efektif oleh Pemerintah Daerah dalam hal menarik investasi asing. Terlebih lagi, berdasarkan instruksi Presiden RI No.3 Tahun 2003 dan Keputusan Departemen Komunikasi dan Informasi RI Jakarta Tahun 2004 tentang *Blue Print* Sistem Aplikasi *E-Government* bahwa adanya pembuatan *website* baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat adalah dengan tujuan untuk menciptakan *good government* untuk menciptakan masyarakat yang berbasis teknologi informasi.
- Selain itu, adalah untuk sarana koordinasi yang lebih baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah



Istilah Paradiplomasi mulai diperkenalkan oleh Soldatos Panayotis, dan kemudian dikembangkan oleh Ivo Duchachek dalam *Perforated Sovereignties Towards a Typology of New Actors In International Relations* dalam *Federalism and International Relations : The Role of Sub-national Units*, Paradiplomasi dilakukan oleh pemerintah sub-nasional disuatu Negara dengan Pemerintah sub-nasional di Negara lain, baik wilayah sub-nasional maupun kedua wilayah Negara tersebut tidak berbatasan



Paradiplomasi merupakan desentralisasi kekuasaan politik dan kewenangan administratif dalam sebuah proses yang terjadi pada aktor-aktor sub nasional, Institusi politik dan kebijakan publik suatu Pemerintahan Pusat dalam kewenangan menjalankan hubungan Luar Negeri, karena Pemerintah Daerah merupakan bentuk yang nyata dari Implementasi Kebijakan Publik

- *Sister City* atau Kota Kembar merupakan hubungan kemitraan yang terjalin dalam konteks hubungan antar Kota dalam kerjasama yang saling menguntungkan dan saling membantu serta menganut prinsip perlakuan sama.
- *Sister City* adalah suatu bentuk kerjasama yang melibatkan Kota disuatu Negara dengan Kota di Negara lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan rasa persaudaraan yang erat dan saling menguntungkan, *Sister City* dapat meningkatkan *volume* kerjasama dengan perkembangan di berbagai bidang kerjasama yang dianggap perlu bagi kesejahteraan masyarakat disuatu Kota



Aktivitas Paradiplomacy dalam E-Government

- Setiap potensi Daerah yang dimiliki seperti pariwisata, perdagangan, dan investasi yang diinformasikan melalui website masing-masing OPD
- Penggunaan multi Bahasa pada website dan aplikasi-aplikasi yang ditujukan untuk promosi daerah
- Aplikasi yang menghubungkan kantor-kantor pemerintah daerah dengan kedutaan besar dan kantor konsulat
- Pemanfaatan aplikasi yang menghubungkan UKM daerah ke Investor Asing
- Pemanfaatan Aplikasi Pelaporan Orang Asing, dengan mensosialisasikan kepada pihak-pihak seperti hotel, apartemen, mess perusahaan, losmen, *guest house*, *villa*, tempat kos, rumah kontrakan, dan jenis penginapan lainnya yang bersifat komersil atau merupakan fasilitas akomodasi milik perusahaan yang ada di daerah guna pemetaan warga asing/turis di daerah.
- Saling bertukar informasi dengan mitra sister city guna mempromosikan daerah